

SBYB-nomics

19/10/2009 23:52:07 WIB

Oleh **Mudrajad Kuncoro***)

JAKARTA, INVESTOR DAILY

Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBYB) akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober besok. Beberapa hari kemudian dapat dipastikan presiden akan melantik kabinet baru.

Pertanyaan yang ditunggu rakyat adalah, apakah SBYB akan sekadar me-'lanjutkan' kebijakan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir? Bagaimanakah program 100 hari kabinet baru? Adakah terobosan arah kebijakan dan pola pembangunan sampai 2014?

Dalam acara Diskusi Publik 'Boediono Mendengar' beberapa bulan lalu di Yogyakarta, berbagai komponen masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan menarik. Walikota Yogyakarta Herry Zudiyanto, mewakili pemda menyarankan kepada presiden dan wapres terpilih agar para pejabat pusat dari presiden hingga eselon 1 lebih sering ke daerah dan mendengarkan suara 'arus bawah'. Walikota mengaku minimnya frekuensi pertemuan dengan presiden dan menteri selama lebih dari lima tahun terakhir.

Selain itu, pemda merasakan tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti stimulus fiskal, kredit usaha rakyat (KUR), bantuan langsung tunai (BLT), dan penyelamatan perusahaan di tengah krisis global. Dengan kata lain, pola perencanaan dan pengambilan keputusan selama ini dirasakan sangat terpusat dan kurang melibatkan pemda. Ini karena pola perencanaan dan pembangunan Indonesia bersifat sektoral meski melibatkan 500-an kabupaten/kota serta 33 provinsi.

Ketimpangan dan Ketergantungan

Ketika otonomi daerah dicanangkan 1 Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomotif akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, sebelumnya, 'lagu' yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia adalah sentralisasi dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando pembangunan.

Akibatnya, para birokrat di daerah sudah terlanjur menunggu 'petunjuk' dari pusat dan tuntunan dari atas. Sentralisasi birokrasi maupun konsentrasi geografis aktivitas bisnis ke arah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias ke Kawasan Indonesia Barat, khususnya Jawa, daerah metropolitan/kota besar. Di Kawasan Indonesia Timur, *growth pole* terjadi hanya di daerah yang memiliki sumberdaya alam (SDA) melimpah.

Tidak heran, Papua, Kaltim, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang kaya dengan tambang atau hasil hutan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan menikmati bagi hasil SDA yang melebihi Dana Alokasi Umum (DAU). Ironisnya, mayoritas kabupaten dan kota tergolong daerah tertinggal. Total daerah tertinggal di seluruh Indonesia tercatat masih 199 kabupaten dan kota. Dengan kata lain, berapa pun pertumbuhan ekonomi yang akan dipatok oleh pemerintah, hal yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah tidak meratanya 'kue pembangunan dibikin dan dibagi'.

Selain itu, salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari Pusat dalam bentuk dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil). Adalah ironis, kendati UU telah menggarisbawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, justru kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Barangkali UU Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sudah saatnya ditinjau ulang oleh pemerintah dan DPR yang baru.

Prioritas Kebijakan Ekonomi

Dipilihnya SBYB sebagai presiden dan wakil presiden pada 2009 tampaknya mencerminkan tingginya harapan rakyat akan kontinuitas dan perubahan mendasar khususnya menjawab *unfinished agendas*. Sejak 20 Oktober 2004, SBY menekankan pentingnya *new deal* tersebut sebagaimana tertuang dalam *triple track strategy*, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. Kini, setelah lima tahun berlalu, saatnya SBYB meninjau

kembali mana program dan implementasi kebijakan yang sudah terlaksana 100% dan mana yang belum tuntas.

Beberapa *unfinished agendas* setidaknya meliputi, pertama, tingkat kemiskinan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% tahun 2008, bahkan menjadi sekitar 14% tahun 2009. Bila angka ini dapat dipercaya, rekor kemiskinan tersebut adalah paling rendah, baik besaran maupun persentasenya, selama 11 tahun terakhir. Kendati demikian, angka tersebut masih jauh dari target kemiskinan awal yang ditentukan akan hanya 8,2% tahun ini,

Kedua, perlunya peningkatan 'kualitas' pertumbuhan ekonomi. Pascakrisis 1998, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi relatif rendah, hanya sekitar rata-rata 4,5% per tahun. Tahun 2008 perekonomian Indonesia mampu mencapai tingkat pertumbuhan 6,1%, rekor tertinggi setelah krisis ekonomi 1998. Kendati demikian, angka pengangguran terus meningkat sampai menyentuh angka 10,28% pada 2006, turun menjadi 9,9% pada 2007, dan menjadi 8,5% pada Februari 2008.

Relatif tingginya angka pengangguran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 6% pascakrisis belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial. Inilah fenomena yang disebut *jobless growth*.

Ketiga, perlunya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Menurut *Human Development Report 2007-2008*, HDI Indonesia berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh UNDP. Selain alokasi anggaran yang minimal 20% dari APBN, peningkatan kualitas SDM Indonesia harus menjadi prioritas bagi para menteri dan pemda. Peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan peneliti perlu mendapat perhatian; demikian juga masalah pengangguran terdidik yang cenderung meningkat.

Keempat, perlunya komitmen *zero tolerance on corruption* diterapkan dari pejabat pusat hingga daerah. Tandatanganan pakta integritas bagi para menteri perlu diperluas untuk semua pejabat Indonesia. Perbaikan tata kelola birokrasi/pemerintahan, reformasi birokrasi, perbaikan sistem pengawasan dan audit, beserta tindakan tegas bagi koruptor harus menjadi prioritas untuk memerangi korupsi yang sudah terlanjur 'berjamaah dan bershaf-shaf'.

Kelima, akselerasi pembangunan infrastruktur. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh World Economic Forum yang berjudul *Global Competitiveness Report 2008-2009* menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat 86 dari 143 negara. Kendati agak membaik dibanding tahun sebelumnya, Indonesia masih merupakan negara paling lemah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infrastruktur.

Keenam, mekanisme perencanaan, anggaran dan formulasi kebijakan perlu diubah agar tidak terjadi pembangunan yang cenderung ego sektoral maupun fanatisme daerah yang berorientasi jangka pendek dan proyek. Siklus APBN dan APBD barangkali perlu diubah agar realisasi anggaran tidak terlambat dan cenderung di-'bumihanguskan' pada Desember.

Usulan penetapan periode APBN 1 Januari-Desember, sedangkan APBD 1 April-31 Maret tahun berikutnya perlu dikaji secara serius oleh menteri keuangan. Inilah pentingnya peran presiden dan wapres menjadi 'dirigen suatu orkestra' kebijakan makro, sektoral, dan daerah.

Barack Obama (2008), dalam buku yang berjudul *Change We Can Believe in* menjabarkan dengan rinci visi dan rencana besarnya untuk memperbarui *American Dream*, impian dan janji Amerika. Obama mampu menyakinkan bahwa dialah pemimpin yang dapat menyatukan AS, menjawab tantangan besar yang dihadapi AS, dan bagaimana menggerakkan AS ke depan. Ia menumbuhkan harapan akan perubahan apa yang diinginkan bagi AS.

Saya yakin rakyat Indonesia pun ketika memilih SBYB mendambakan banyak perubahan. Semoga perubahan kebijakan pembangunan Indonesia tidak hanya berhenti dalam 100 hari, namun berkelanjutan selama lima tahun ke depan dan mampu membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Rakyat Indonesia menunggu arah dan implementasi *SBYB-nomics*. Selamat berkarya dan bertugas Pak SBY dan Pak Boed beserta para menteri dalam kabinet baru.

* Penulis adalah Guru Besar FE UGM, Chief Economist PT Recapital Advisors; penulis buku 'Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global'